

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan ternama yang berfungsi sebagai wadah dengan tujuan untuk membina generasi muda. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang kesejahteraan sosial, Karang Taruna bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya. Hal ini agar organisasi dapat menghimpun, menggerakkan, dan menyalurkan partisipasi generasi muda untuk pembangunan. Selain tujuan utama Karang Taruna adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi kreatif generasi muda. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyalurkan energi mereka dengan cara yang produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan masa depan.

Karang Taruna adalah kelompok sosial yang beroperasi di dalam batas desa atau kelurahan, dengan tujuan untuk membuka seluruh potensi anggotanya. Keanggotaan Karang Taruna diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Peraturan ini menyatakan bahwa warga Karang Taruna yang merupakan anggota masyarakat yang berumur antara tiga belas sampai empat puluh lima tahun dan bertempat tinggal di desa, kelurahan, atau tempat yang serupa, dianggap sebagai anggota organisasi. Tujuan utama Karang Taruna adalah membina perkembangan anggotanya di setiap desa atau kelurahan”.

Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat kinerja generasi muda dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus dan landasan kemajuan bangsa. Direktorat Kesejahteraan Anak dan Remaja (1978) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi generasi muda, antara lain:

- 1) Ketidak pastian generasi muda dihari depan
- 2) Tidak seimbangny jumlah anak dan remaja/generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia.

- 3) Cukup besarnya jumlah anak dan remaja yang berhenti sekolah dan anak/remaja yang tidak sekolah.
- 4) Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi pemuda /pemudi dan jumlah pengangguran dikalangan generasi muda yang semakin mengkhawatirkan.
- 5) Kurangnya gizi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 6) Yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat tertentu, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, adalah tindakan menikahi individu yang berusia di bawah usia dewasa.
- 7) Generasi muda mengalami kesulitan fisik, mental, dan sosial.
- 8) Masalah kenakalan remaja merupakan salah satu masalah kompleks yang perlu mendapat perhatian.
- 9) Isu penyalahgunaan narkotika di kalangan individu muda menjadi perhatian yang semakin perlu mendapat perhatian

1) Pentingnya memberikan bimbingan dan dukungan kepada kaum muda berakar pada kenyataan bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi pemimpin masa depan. Generasi ini perlu dibekali dengan keterampilan dasar, prinsip etika yang kuat, dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah airnya, karena mereka akan memainkan peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional yang krusial tersebut, berbagai prakarsa pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan di segala bidang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun, sumber daya manusia, khususnya generasi muda, seringkali menjadi tantangan bagi upaya tersebut.

Kementerian Sosial RI telah mengatur Pokok-pokok Pemberdayaan Karang Taruna melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013, dengan tujuan untuk membina karang taruna sebagai wadah vital bagi tumbuh dan berkembangnya generasi muda yang bertanggung jawab secara sosial, khususnya yang masyarakat pedesaan atau masyarakat adat, dan khususnya di ranah prakarsa kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga bentukan pemerintah, Karang Taruna memiliki rangkaian kegiatan program umum yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan program.

Fokus Karang Taruna saat ini adalah menjalankan program-program yang disusun secara sistematis yang ditujukan untuk pemberdayaan pemuda. Program-program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum muda dan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka:

- a. Peningkatan sumber daya manusia Karang Taruna dengan meningkatkan kapasitasnya;
- b. Peningkatan kelembagaan karang taruna
- c. Pengembangan aktifitas karang taruna
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna
- e. Pengembangan jejaring kerja karang taruna

Regulasi kebijakan seperti PERMENSOS Nomor 23 Tahun 2013 memberdayakan Karang Taruna dan mengatur pembinaan kepemudaan, yang mencakup peran dan fungsinya dalam regulasi dan undang-undang:

1. Peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sah di negaranya masing-masing.
2. Pedoman penyelenggaraan panti sosial dituangkan dalam Permendagri No.5 Tahun 2007.
3. Paragraf 72 dan 73 Peraturan Pemerintah No. 3 masing-masing mengatur tentang organisasi dan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan dokumen hukum penting yang menguraikan peraturan dan pedoman kesejahteraan individu dan masyarakat.

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009, Karang Taruna Tembalang di Kota Semarang merupakan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pendampingan dalam memotivasi dan menggalakkan swadaya di kalangan warga Kelurahan, khususnya menysasar pemuda dan remaja untuk tujuan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Saat ini, program Karang Taruna di Desa Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terlihat berjalan di bawah standar yang diharapkan. Banyak organisasi Karang Taruna di daerah itu yang tidak aktif. Mayoritas kelompok Karang Taruna di seluruh wilayah menghadapi persoalan serupa, bahkan ada yang tidak diketahui masyarakat meski berada di berbagai wilayah Rukun Warga (RW). Setelah beberapa lama tidak beroperasi, Karang Taruna Tembalang Kota Semarang kembali beroperasi pada tahun 2016 dan mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai acara dan inisiatif.

Sesuai pedoman PERMENSOS Nomor 23 Tahun 2013, Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan di Kelurahan Tembalang Kota Semarang. Karang Taruna di daerah tergolong organisasi yang “berkembang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf (a), artinya memiliki struktur dan kepengurusan yang formal, namun kegiatannya tetap sederhana dan bersifat rekreatif, tidak memiliki program yang terarah. Meski telah ditetapkan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap pelaksanaan program Karang Taruna di Desa Tembalang Kota Semarang.

Setelah dilakukan observasi, peneliti menemukan bahwa Karang Taruna di Desa Tembalang Kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan program Karang Taruna. Kesulitan yang dihadapi oleh Karang Taruna di Desa Tembalang terdiri dari:

1. Penyertaan ad-hoc dari kegiatan yang tidak terjadwal tanpa kerangka kerja yang sistematis atau teratur untuk pelaksanaannya.
2. Implementasi sistem baru untuk organisasi dan keanggotaan sedang berlangsung.
3. Pengawasan yang optimal terhadap kinerja Karang Taruna belum tercapai secara maksimal.

Penting untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan waktunya secara efektif. Hal ini akan mengarah pada pengembangan generasi yang mewujudkan ketahanan, kecakapan, moralitas, amanah, akuntabilitas dan keandalan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, serta kepedulian terhadap lingkungannya. Sayangnya, hal tersebut belum tercapai secara

optimal karena Karang Taruna merasa kekurangan dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki dan menganalisis hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Karang Taruna dalam Pembinaan Remaja di Kelurahan Tembalang Semarang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Karang Taruna di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi program Karang Taruna dalam pembinaan remaja di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

1.3. Tujuan Penelitian

Peneliti setelah memahami pokok masalah yang nantinya akan diteliti maka tujuannya ialah:

1. Menganalisis Implementasi program Karang Taruna dalam pembinaan remaja di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
2. Faktor apa saja yang mendorong implementasi program Karang Taruna dalam pembinaan remajadi Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman dan pemahaman tentang teori sosial yang relevan dengan implementasi kebijakan.
- b. Dengan berbagi ide dengan pembuat kebijakan, individu dapat membantu meningkatkan pelaksanaan program saat ini dan berkontribusi untuk menyempurnakan pelaksanaan program di masa mendatang.
- c. Dengan berbagi pengetahuan selama proses perumusan kebijakan, seseorang dapat berkontribusi untuk menciptakan pengembangan program yang partisipatif, efektif, dan efisien.

d. Hal tersebut di atas dapat menjadi bahan berharga untuk mendapatkan wawasan dan memfasilitasi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara praktis

Dari segi kepraktisan, diantisipasi akan ada keuntungan, yang mungkin termasuk:

- a. Upaya peningkatan kebijakan publik terkait pembinaan kepemudaan dilakukan melalui program Karang Taruna.
- b. Hasil penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program Karang Taruna tentang pembinaan pemuda di Desa Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber daya bagi pemerintah terkait untuk mempertimbangkan opsi alternatif dan mengevaluasi kebijakan, sehingga membantu memantau kemajuan program dan menginformasikan upaya implementasi di masa mendatang.

1.4.1. Kajian Teori

1.4.2. Penelitian Terdahulu

Dalam pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, hal tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini. Harapannya, penelitian ini dapat membangun dan mereplikasi temuan bermanfaat dari penelitian sebelumnya. Setelah memeriksa penelitian yang dilakukan sebelumnya, tidak ditemukan penelitian lain yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saat ini. Penulis telah menyusun daftar artikel jurnal relevan yang ditemukan selama penelitian topik ini.

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELETIAN	METODOLOGI	LOKUS	TEMUAN UTAMA	KELEMAHAN	KEUNGGULAN
1.	Mira Anggita Sari, Muhammad Prima Ersya,2018	Penelitian kualitatif jenis Deskriptif ini mengkaji masalah yang	Lokasi ini berada di kenagarian sitiung, Kecamatan	Pelaksanaan Program karang taruna dalam Pembinaan	Remaja itu Sendiri sebagai anggota karang taruna Yang tidak	Adanya Rencana baru dan peningkatan Program tentu akan ada

		Sedang berlangsung dalam Masyarakat.	sitiung, kabupaten Dharmasraya terutama pada jorong Blok a pirukot utara, pirukot selatan, Sitiung, pulai, padang sidondang dan Lawai.	remaja, hambatan Pelaksanaan program karang taruna Dalam membina remajanya dan Langkah perbaikan pelaksanaan Program karang taruna dalam Pembinaan remaja.	memiliki jiwa sosialisasi Dalam lingkungan masyarakat. Mayoritas warga karang Taruna sudah bekerja dan mempunyai Kesibukan masing-masing. Selain itu Kecenderungan anggota karang taruna Dalam mengikuti pola pikir anggota Karang taruna yang lain sehingga Organisasi tersebut kering akan ide.	perubahanperubahan Yang sesuai dengan Rencana yang telah disetel ulang. Lebih memperbanyak Kegiatan-kegiatan positif dan Kerohanian agar mental remaja Terbentuk.
2	SUTRISNO, ANJAS (2021)	Metode kualitatif ini bertujuan agar dapat mengungkapkan	Dusun blambangan kelurahan kauman kidul	Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti yakini cukup	Anggota yang masih belum lancar dalam membaca alqur'an	Anggota Karang Anggota Karang Taruna melakukan kegiatan

		<p>fakta, variabel, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung. Pendekatan kualitatif diarahkan untuk memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori.</p>	<p>Kecamatan sidorejo kota salatiga.</p>	<p>mewakili situasi keseluruhan pemuda di dusun Blambangan, ditemukan bahwa pembinaan keagamaan dan kemandirian anggota pemuda dapat dilaksanakan. Pembinaan ini sangat relevan bagi 51 pemuda di dusun tersebut, karena bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar lebih mandiri dan</p>	<p>sehingga mereka cenderung kurang percaya diri saat mengikuti kegiatan keagamaan di Karang Taruna Dusun Blambangan. Dalam segi pendanaan dari Karang Taruna tersebut merasa cukup sulit jika sedang membuat suatu kegiatan besar serta dalam hal organisasi bahwa beberapa anggota masih kebingungan dalam pembagian waktu mereka untuk organisasi dan</p>	<p>pembangunan keagamaan dan kemandirian yang dilaksanakan dengan dukungan masyarakat, keluarga, dan perangkat desa, yang menjadi pendorong semangat dan motivasi mereka</p>
--	--	--	--	--	--	--

				membumi secara spiritual	urusan pribadi. 61	
3	Yoga Finoza Crisandye,2018	Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif	Taruna Remaja Kita di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kotan Cimahi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota karang taruna Remaja Kita di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.	Mengingat begitu pentingnya peran Karang Taruna dalam menumbuhke mbangkan kreativitas pemuda, Karang Taruna Remaja RW 14 Desa Cibeber, Cimahi Selatan, sangat menyadari tanggung jawabnya dalam hal ini	Sebagian besar dari mereka cenderung berkumpul tanpa tujuan atau kegiatan yang jelas, yang pada akhirnya hanya membuang- buang waktu.	Sejumlah besar remaja usia sekolah dan yang baru lulus tidak memiliki kegiatan yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka, membuat mereka tidak memiliki pengisi waktu yang produktif atau bekal yang berharga untuk kehidupan masa depan mereka
4	Herlina Herlina,2016	Pendekatan yang peneliti	Desa Midang		Dana merupakan	Berpartisipasi dalam kegiatan

		<p>gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Baratl.</p>		<p>salah satu faktor pendukung dalam penerapan pelaksanaan program karang taruna di Desa Midang Fasilitas juga merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan pendanaan dalam penerapan pelaksanaan program karang taruna oleh karena itu di butuhkan kerja sama yang baik dari masyarakat dan lembagalemba</p>	<p>pemuda dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mempromosikan tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mencegah, mengatasi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial</p>
--	--	--	---	--	--	--

					ga	
5	Arrun Pratama Putra,2015	Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan akan di analisis dengan teknik deskriptif	Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang	Karang Taruna melakukan berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, penguatan kelembagaan Karang Taruna, mendorong pengembangan kegiatan Karang Taruna, peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna, dan memperluas jaringan Karang Taruna	Dalam melaksanakan program pemuda, pentingnya fasilitas tidak dapat diabaikan, karena sama pentingnya dengan pendanaan. Konsekuensinya, masyarakat dan institusi harus berkolaborasi secara efektif untuk memastikan bahwa fasilitas tersedia, Belum adanya penjadwalan kegiatan yang sistematis, serta struktur organisasi dan keanggotaan yang baru	Dengan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kepemudaan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa sebenarnya kehidupan komunitas. Melalui program Karang Taruna, perilaku positif dapat ditumbuhkan dan ditunjukkan. Karang Taruna memiliki agenda kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang akan dilakukan, yang sudah tersusun secara sistematis. Kepengurusan

					terbentuk, menyebabkan pengawasan terhadap kinerja Karang Taruna kurang optimal.	Karang Taruna 14 Ulu baru-baru ini aktif kembali dan membentuk kembali struktur kepengurusannya
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Skripsi tentang karang taruna dalam pembinaan remaja

Dari Hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan . Menggunakan teori Implementasi , Adapun persamaan pada skripsi ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Bahkan, satu lagi kedekatan terhadap eksploitasi ini adalah membidik karang taruna dalam pembinaan remaja . Sementara itu , lokasi penelitian menjadi salah satu perbedaan

Pada skripsi ini .dimana area penelitian skripsi ini dilakukan dikelurahan Tembalang ,Kecamatan Tembalang , Kota Semarang, sementara itu lokasi penelitian dari hasil penelitian terdahulu yaitu di kelurahan 14 Ulu,Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

1.5 Administrasi Publik

1.5.1 Pengertian Administrasi Publik

Agenda kegiatan yang sudah ada sebelumnya telah ditetapkan, yang akan menjadi acuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja Karang Taruna dalam melaksanakan tugas-tugas yang direncanakan, menyiratkan bahwa ada beberapa batasan untuk apa yang dapat mereka capai.

Menurut Liang Gie (1976) yang dikutip dalam Damai Darmadi dan Sukidin (2009:5), administrasi mengacu pada upaya kolektif sekelompok individu untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sondang P. Siagian, sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafii (2010:14), mendefinisikan Administrasi sebagai proses lengkap pelaksanaan keputusan yang telah dibuat, yang biasanya melibatkan upaya beberapa individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Damai Darmadi dan Sukidin (2009: 6), Wijana dan Z. Wayong menyampaikan bahwa administrasi mengacu pada semua organ negara, baik rendah maupun tinggi, yang bertanggung jawab atas pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan urusan pemerintahan.

Inu Kencana Syafii (2010: 18) mendefinisikan pemahaman publik sebagai seperangkat pikiran, sikap, perasaan, harapan, dan tindakan kolektif berdasarkan nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang.

Dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik, Dwight Waldo (sebagaimana dikutip dalam Inu Kencana Syafii, 2010: 25) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia dan peralatan untuk tujuan mencapai tujuan pemerintahan. Di sisi lain, Edward H. Litchfield (sebagaimana dikutip dalam Inu Kencana Syafii, 2010: 25) mencirikan Administrasi Publik sebagai studi tentang bagaimana lembaga pemerintah yang berbeda disusun, dikelola, didanai, dimotivasi, dan dipandu.

Menurut kontribusi Z. Wayong pada buku Administrasi Publik oleh Damai Darmadi dan Sukidin (2009:7), tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk mengatur kegiatan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan mereka terwujud.

Definisi administrasi publik di atas mengarah pada kesimpulan bahwa itu adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.5.1.2 Paradigma Administrasi Publik

Studi Administrasi Negara telah mengalami berbagai pergeseran paradigma sepanjang evolusinya. Menurut Nicholas Henry dalam publikasinya “Administrasi Publik”, perkembangan ilmu administrasi publik dapat digambarkan sebagai berikut (Yogi Suprayogi Sugandi, 2011:10-13)::

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (*The Politics-Administration Dichotomy*) (1900-1926)

Paradigma membagi politik dan administrasi pada awalnya dikembangkan oleh Woodrow Wilson dan Frank Goodnow. Pembagian ini merupakan akar penyebab maraknya sistem patronase dan sistem rampasan dalam perekrutan pegawai negeri dalam pemerintahan Amerika saat ini.

Definisi politik berkaitan dengan tujuan dan kebijakan pemerintah dan administrasi, yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, administrasi tidak mungkin tetap tidak memihak karena kepentingan politik biasanya bertujuan untuk mempertahankan otoritas mereka. Pembagian ini menekankan pada penempatan pejabat administrasi yang selaras dengan kepentingan politik, sehingga menghasilkan pejabat publik yang tidak memihak dan seringkali memihak elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

Keahlian teknis administrasi memungkinkan mereka untuk menentukan cara yang paling efektif untuk implementasi kebijakan, dan pejabat terpilih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tujuan tercapai. Namun, para pejabat ini kerap mendapat tekanan dari tokoh politik. Saat memberikan tujuan khusus kepada karyawan, dinamika ini disebut sebagai administrasi politik, yang berpusat di sekitar dikotomi nilai dan fakta. Dalam paradigma ini, birokrasi berfungsi sebagai focal point, bukan legislatif atau yudikatif.

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (*The Principles of Administration*) (1927-1937)

Selama paradigma sekunder ini, para ahli administrasi pada masa itu menemukan gagasan ilmu administrasi, yang meliputi:

1. Menurut bukunya, *Principles of Public Administration* (1927), Willoughby membahas dasar-dasar administrasi publik.
2. Mary Parker Follet menulis buku "Pengalaman Kreatif" pada tahun 1924.
3. Dalam publikasinya tahun 1930 "Manajemen Industri dan Umum", Henry Fayol membahas praktik manajemen di sektor industri dan seterusnya.
4. Buku *Principles of Organizations*, yang ditulis bersama oleh James D. Mooney dan Reiley, menggali prinsip dan praktik penting manajemen organisasi.
5. Buku F. W. Taylor, *Principles of Scientific Management*, diterbitkan pada tahun 1911

Selama fase perkembangannya, administrasi ini juga menemukan bahwa:

- Dengan menolak untuk menerima dikotomi antara bidang politik dan administrasi, pendekatan baru untuk tata kelola dapat diadopsi.
- Sekarang diakui secara luas bahwa administrasi publik bukan sekadar entitas yang netral dan tidak memihak, melainkan yang mewujudkan nilai-nilai administrasi yang berbeda dari nilai-nilai politik. Hal ini diartikulasikan oleh John Gaus pada tahun 1950 ketika dia menyatakan bahwa teori administrasi publik di era kita harus mencakup teori politik juga

Prinsip-prinsip administrasi, terutama yang dikemukakan oleh Willoughby, menunjukkan bahwa administrasi adalah konsep tersendiri yang tidak dapat dicampur dengan bentuk-bentuk prinsip lainnya.

Dalam argumentasi terakhirnya, Taylor mengusulkan implementasi administrasi dalam bukunya "The Principles of Scientific Management". Gullick dan Urwick kemudian mempresentasikan berbagai metode untuk memahami fungsi-fungsi manajemen ini dalam model POSDCORB mereka (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran), yang kini dianggap sebagai pokok manajemen modern. Selama era ini, administrasi publik mendapat kritik keras karena ketinggalan zaman dan ortodoks, yang memunculkan perilaku administrasi yang diusulkan Herbert Simon. Buku ini akhirnya menghasilkan Simon Hadiah Nobel dalam

perkembangannya, menandai salah satu kontribusi ilmu administrasi publik yang paling signifikan untuk perspektif yang luas.

c. Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (*Public Administration as Political Science*) (1950-1970)

Paradigma ketiga administrasi publik ditandai dengan keragaman perspektif politik. Para sarjana secara aktif merevisi definisi lokus administrasi publik, yang dikenal sebagai birokrasi pemerintahan. Bidang administrasi publik terdiri dari banyak karya akademis dalam domain yang lebih luas dari ilmu politik. Akibatnya, disiplin itu sendiri, yang didirikan pada paradigma kedua, menghadapi kritik tajam karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan publik secara memadai.

Gelombang studi empiris tentang administrasi publik muncul selama era ini. Sayangnya, studi ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan politik, yang mengarah pada penciptaan "Tipe PA" dan "Tipe PS", diikuti oleh "Tipe PSA". Klasifikasi ini mengkategorikan Administrasi Publik (PA) sebagai entitas sekunder dalam domainnya sendiri.

d. Paradigma 4: *Public Administration as Management*) (1956-1970)

Ilmu administrasi publik mendapat dukungan dari adiknya, ilmu manajemen, sebagai akibat dari pengabaianya di tahun-tahun sebelumnya. Khususnya, jurnal terkemuka di AS telah memperkenalkan konsep baru, seperti yang disajikan oleh American Society for Public Administration's *Public Administration Review*. Selain itu, beberapa artikel yang mengeksplorasi ide-ide baru telah ditampilkan di jurnal terkemuka seperti *Administrative Quarterly* dan lainnya.

Gagasan pengembangan organisasi telah beredar cukup lama dan telah dipelajari oleh berbagai sarjana administrasi publik. Meskipun berumur panjang, konsep manajemen ini menghadirkan paradoks dalam studi ilmu politik karena sifatnya yang sangat empiris, sehingga sulit untuk mengidentifikasi

benang merah. Namun, seiring berkembangnya bidang ilmu politik dan manajemen, teori seputar perilaku organisasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Ini mengarah pada pengembangan teknik manajemen seperti kepemimpinan, motivasi, komunikasi, sistem informasi manajemen, penganggaran, audit, dan pemasaran, yang semuanya merupakan konsep yang relatif baru di bidang ilmu politik dan administrasi.

Konsep aktor dalam paradigma ini berasal dari berbagai sumber, termasuk karya James G. March dan Herbert Simon dalam *Organisasi* (1958), *Buku Pegangan Organisasi* bulan Maret (1965), dan *Organisasi dalam Aksi* James D. Thompson (1967). Karya-karya ini secara kolektif menunjukkan bahwa ilmu manajemen adalah bentuk teoretis dari teori organisasi.

e. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (*Public Administration as Public Administration*) (1970an)

Nicholas Henry (1975) mempresentasikan paradigma terakhir dalam *Public Administration Review*, yang menyoroti bahwa ilmu administrasi publik merupakan penggabungan yang kompleks dari berbagai konsep. Ilmu ini mencakup pembukaan beberapa program pascasarjana di departemen administrasi publik di seluruh Amerika Serikat.

Dalam “*Modern Public Administration*” (1977), Felix A. Nigro dan Lloy G. Nigro membahas bagaimana para sarjana ilmu administrasi publik telah mengembangkan perspektif yang berbeda dari waktu ke waktu:

1. Fokus pada kelompok kooperatif dalam manajemen publik adalah upaya bersama.
2. Pemerintahan suatu negara dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang-cabang ini saling terkait erat dan bekerja bersama secara kooperatif alih-alih menjadi entitas yang sepenuhnya terpisah.
3. Administrasi Publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, itu merupakan komponen integral dari proses politik.

4. Administrasi publik dapat dibedakan dari organisasi swasta dalam beberapa cara. Satu perbedaan utama adalah bahwa organisasi swasta cenderung memprioritaskan keuntungan dan keuntungan finansial, sedangkan administrasi publik tidak digerakkan oleh motif keuntungan yang sama.
5. Bidang administrasi publik bertanggung jawab untuk memberikan layanan penting kepada publik..

Asosiasi administrasi publik modern selalu terbukti dengan:

- a. Adanya kerjasama antar ketiga cabang pemerintah
- b. Perumusan kebijakan
- c. Proses politik
- d. Pelayanan publik.

Suwitri (2009:19) menyatakan masih ada kerangka berfikir ilmu administrasi publik yang baru, administrasi publik ini menekankan dalam teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokus administrasi publik ini kepentingan publik dan perkara publik. Suwitri (2009:21) mengemukakan paradigma administrasi publik sudah berkembang seiring dengan menggunakan pergeseran orientasi ilmu administrasi publik yaitu orientasi dalam birokrasi lalu bergeser orientasinya dalam kepentingan publik. Perkembangan paradigma yang terakhir yaitu :

1. Reinventing Government

Dalam paradigma ini, administrasi publik dipaksa untuk melakukan reformasi administrasi dengan cara mengubah budaya kerja dan reformasi administrasi publik. Hal ini disebabkan pinjaman ilmu administrasi bisnis ke dalam ilmu administrasi publik. Administrasi publik mulai mengubah pola kerja birokrasi dari berorientasi pelayanan birokrasi menjadi berorientasi pelayanan masyarakat. Paradigma ini, memperkenalkan mekanisme pasar yang melayani masyarakat sebagai pelanggan.

2. Good Governance

Menurut paradigma ini pemerintahan akan berjalan dengan baik jika mengikuti tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat. Young (2020:482) mengatakan bahwa *Good Governance*

lahir dari lensa sosiologis bahwa administrasi dan manajemen publik terfragmentasi dan mempunyai sifat yang tidak pasti. *Good Governance* menciptakan sebuah konsep normatif tentang apa yang dianggap tata pemerintahan yang baik. Sedangkan tata kelola yang baik berfokus pada keterkaitan pemegang kekuasaan, transparansi, agenda kesetaraan, etika perilaku, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Menurut *United Nations Development Programme* (dalam Arisaputra,2013:198) mengusulkan ciri-ciri *good governance*, yaitu:

a. *Participation.*

Semua warga Negara memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mediasi lembaga sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi tersebut didasarkan kebebasan berasosiasi dan mengemukakan pendapat serta berpartisipasi konstruktif.

b. *Rule of Law.*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum hak asasi manusia.

c. *Transparancy.*

Transparansi didasarkan kepada arus informasi yang bebas. Proses, institusi dan informasi dapat diterima secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dimengerti dan mudah dipahami.

d. *Responsiveness.*

Lembaga dan proses harus berusaha untuk melayani semua pemangku kepentingan.

e. *Consensus Orientation.*

Good Governance memediasi berbagai kepentingan dan mendapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas baik dalam segi kebijakan maupun prosedur.

f. *Equity*.

Semua warga negara, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan.

g. *Effectiveness and Efficiency*.

Proses-proses dan lembaga-lembagadibuat menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan sesuai dengan yang telah digariskan.

h. *Accountability*.

Pemerintahan, sektor swasta dan pengambil keputusan dalam masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholders*” pemangku kepentingan. Akuntabilitas tergantung pada sifat organisasi dan keputusan yang dibuat, tidak masalah jika keputuasan ini melayani kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. *Strategic Vision*.

Para pemimpin dan masyarakat umum harus memiliki pandangan *good governance* yang luas dan visioner sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan manusia yang konsisten untuk jenis pembangunan tersebut.

1.5.2 Kebijakan Publik

1.5.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab (2015:10), Knoepfel dan rekan (2007) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian keputusan atau tindakan yang muncul dari interaksi berulang dan terstruktur di antara aktor yang berbeda, baik publik maupun swasta, yang terlibat dalam berbagai kapasitas. Pembuatan kebijakan seringkali

merupakan tanggapan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah publik yang didefinisikan secara politis.

Berbagai otoritas dan sumber telah berusaha untuk menetapkan definisi kebijakan yang tepat. Salah satu definisi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Eystone dalam karya Budi Winarno (2008:17), adalah bahwa kebijakan publik secara luas dapat didefinisikan sebagai interaksi antara entitas pemerintah dan lingkungannya.

Menurut WI Jenkins, seorang ahli Inggris terkenal (sebagaimana dikutip dalam Solichin Abdul Wahab, 2015:15), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai seperangkat pilihan yang dibuat oleh satu atau beberapa tokoh politik. Pilihan ini dibuat sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta metode untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa keputusan-keputusan ini dibuat dalam batas-batas kekuasaan dan otoritas aktor.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2015: 15), definisi kebijakan publik Chief JO Udoji mencirikan sebagai tindakan yang disengaja yang disetujui, diarahkan pada tujuan tertentu, saling bergantung, dan berdampak signifikan pada sebagian besar anggota masyarakat.

Berbagai definisi kebijakan publik menunjukkan bahwa itu terdiri dari serangkaian pilihan dan langkah-langkah yang diterapkan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada populasi yang lebih besar.

1.5.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam karya Budi Winarno (2012: 35-37), tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda

Pejabat publik, baik yang dipilih maupun diangkat, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan isu mana yang diprioritaskan untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Di masa lalu, isu-isu ini harus bersaing satu sama lain untuk masuk ke dalam agenda kebijakan.

- 2) Tahap Formulasi Kebijakan

Para pembuat kebijakan terlibat dalam diskusi isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Isu-isu ini didefinisikan dengan jelas, dan pilihan yang berbeda untuk kebijakan dieksplorasi. Masing-masing opsi tersebut bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah mempertimbangkan banyak pilihan kebijakan, mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan yudisial pada akhirnya mengarah pada pengadopsian satu alternatif kebijakan di antara banyak yang diusulkan oleh pembuat kebijakan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berada di bawah lingkup unit administrasi yang menggunakan sumber daya keuangan dan manusia. Selama proses implementasi, berbagai kepentingan dapat muncul dan bersaing satu sama lain. Sementara beberapa implementasi kebijakan mungkin mendapat dukungan dari pelaksana, yang lain mungkin menghadapi tentangan dari kelompok yang sama.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diberlakukan, perlu untuk mengevaluasi keefektifannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk instansi pemerintah, konsultan eksternal, media, dan masyarakat umum

Fokus penelitian ini terletak pada tahapan implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan yang telah dikembangkan oleh pemerintah diwujudkan melalui berbagai program.

1.5.3 Implementasi Kebijakan

1.5.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) menegaskan bahwa diseminasi keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran merupakan fungsi utama implementasi yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan kebijakan. Agustino (2008:139) menjelaskan

implementasi sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan tindakan para pelaksana kebijakan. Upaya mereka ditujukan untuk menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Menurut Winarno (2014: 148), Ripley dan Franklin menegaskan bahwa implementasi mengacu pada tindakan yang diambil setelah berlakunya undang-undang yang memberikan suatu program dengan otoritas, kebijakan, manfaat, atau beberapa bentuk keluaran yang konkret. Proses implementasi melibatkan tindakan aktor, khususnya birokrat, yang bertugas memastikan kelancaran fungsi program. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) berbagi perspektifnya tentang implementasi, menyatakan bahwa tujuan utama adalah untuk menciptakan hubungan yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Kebijakan publik, sebagaimana didefinisikan oleh Thomas R. Dye (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2008: 7), adalah suatu usaha yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam kaitannya dengan tujuan atau sasaran program pemerintah. Di sisi lain, Carl Friedrich (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan guna mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi ancaman dan peluang. Menurut Alfatih (2010: 2), kebijakan publik mencakup setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang disengaja dan sah. Tujuan dari keputusan atau tindakan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdayakan publik, dan memajukan kesejahteraan publik.

Menurut Alfatih (2010: 15), pelaksanaan mandat suatu kebijakan yang benar dan tepat adalah apa yang diperlukan oleh implementasi kebijakan, dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan kebijakan. Demikian pula, Van Meter Van Horn (dalam Leo Agustino, 2008: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas pemerintah atau swasta menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah mekanisme dimana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak

lebih dan tidak kurang. Ada dua pendekatan untuk mengimplementasikan kebijakan publik: implementasi langsung melalui sarana programatik, atau melalui perumusan kebijakan turunan berdasarkan kebijakan utama.

Setelah mencermati berbagai definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan ini merupakan langkah kritis dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan selama implementasi program dapat berdampak besar pada keseluruhan prosedur kebijakan. Proses implementasi terjadi pasca persetujuan kebijakan dan sama pentingnya dengan tahapan kebijakan publik lainnya.

Menurut Deddy Mulyadi (2015: 12-13) dalam bukunya *Kajian Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Implementasi diartikan sebagai proses pengambilan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan resolusi-resolusi tersebut ke dalam pola-pola praktis, dengan maksud mewujudkan perubahan-perubahan yang telah ditentukan sebelumnya, baik signifikan maupun minor. Implementasi terutama merupakan upaya untuk memahami apa yang harus terjadi setelah program dilaksanakan. Eksekusi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga yang bertanggung jawab, tetapi juga mencakup jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang rumit.

Penerapan praktis dari setiap keputusan melibatkan proses implementasi. Proses ini dapat dipecah menjadi beberapa tahap yang berbeda, termasuk:

1. Proses meratifikasi undang-undang dan peraturan biasanya terdiri dari beberapa tahapan yang berbeda. Tahapan ini dapat mencakup penyusunan awal undang-undang atau peraturan yang diusulkan, diikuti dengan periode komentar dan umpan balik publik. Setelah tahap ini, pembuat undang-undang dapat membuat revisi dan amandemen terhadap draf awal sebelum mengajukannya untuk tinjauan formal dan kemungkinan persetujuan. Jika undang-undang atau peraturan tersebut disetujui, undang-undang atau peraturan tersebut dapat dikenakan pengawasan dan penegakan tambahan oleh berbagai badan dan departemen pemerintah.
2. Pelaksanaan resolusi oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

3. Kesiapan audiens yang dituju untuk melaksanakan keputusan yang ada merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.
4. Pengaruh keputusan, baik disengaja maupun tidak, dapat memberikan dampak yang signifikan.
5. Seperti yang diantisipasi oleh organisasi pelaksana, konsekuensi resolusi telah membuahkan hasil.
6. Upaya menyempurnakan kebijakan, hukum, dan peraturan merupakan upaya bersama yang bertujuan untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada

Ada beberapa elemen penting yang terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan, antara lain:

1. Tahap awal dari setiap proyek melibatkan pembentukan sumber daya, unit, dan metodologi.
2. Konversi kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat disetujui dan layak untuk diimplementasikan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran, dan hal-hal rutin lainnya merupakan bagian penting dari setiap operasi standar

Oleh karena itu, signifikansi suatu kebijakan terletak pada eksekusi, interpretasi, dan implementasinya yang metodis. Menurut Deddy Mulyadi (2015: 13-15), berikut adalah fase-fase praktis yang terlibat dalam implementasi kebijakan:

1. Tahapan Interpretasi

Fase pengembangan kebijakan melibatkan transformasi kebijakan umum dan abstrak menjadi kebijakan atau tindakan manajerial dan operasional yang lebih konkret. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini tidak hanya mencakup proses penjabaran kebijakan abstrak menjadi pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan kepada pemangku kepentingan baik dalam bentuk abstrak maupun operasional.

2. Tahapan Pengorganisasian

Tugas awal dalam fase ini adalah mengidentifikasi pelaksana kebijakan, yang dapat mencakup lembaga pemerintah (baik pusat maupun daerah), LSM,

komponen masyarakat, dan sektor swasta. Setelah pelaksana diidentifikasi, prosedur kebijakan definitif dibuat untuk berfungsi sebagai panduan, referensi, dan pencegahan kesalahpahaman yang mungkin timbul selama implementasi. Selanjutnya, anggaran dan sumber pembiayaan ditentukan, beserta peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Kemudian ditetapkan manajemen implementasi kebijakan yang meliputi pola kepemimpinan dan koordinasi implementasi, serta mengidentifikasi titik implementasi. Terakhir, dibuat jadwal implementasi kebijakan untuk memberikan garis waktu yang jelas dan sebagai alat evaluasi efisiensi implementasi kebijakan.

3. Tahapan Implikasi

Tindakan yang dilakukan selama tahap ini berfungsi sebagai manifestasi dari semua tahap sebelumnya yang telah diselesaikan.

Selama penerapan suatu kebijakan, para ahli mencatat banyak elemen berbeda yang dapat memengaruhi keberhasilannya. Dengan menganalisis elemen-elemen tersebut, kita dapat mengidentifikasi seperangkat faktor yang berulang yang memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain:

a. Isi *Content* Kebijakan

Agar kebijakan konten dianggap baik, ia harus memiliki karakteristik tertentu, termasuk kejelasan, tidak ada distorsi, landasan teori yang terbukti, komunikasi yang mudah kepada audiens yang dituju, dan dukungan yang memadai dari sumber daya keuangan dan manusia.

b. Implementor dan Kelompok Target

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada lembaga pelaksana, atau "pelaksana", dan kelompok sasaran. Untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan pembuat kebijakan, pelaksana harus memiliki kemampuan, kompetensi, komitmen, dan konsistensi yang diperlukan. Selain itu, kelompok sasaran yang berpendidikan dan relatif homogen lebih cenderung menerima kebijakan daripada yang tertutup, tradisional, dan beragam. Selain itu, kelompok sasaran yang besar yang mewakili sebagian besar populasi dapat semakin memperumit keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Lingkungan

Keberhasilan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta tingkat dukungan politik dan budaya masyarakat di mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Kebijakan lebih mungkin berhasil dalam masyarakat maju dengan sistem politik yang stabil dan demokratis, dan masyarakat sehari-hari yang suportif yang memfasilitasi implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut telah diberlakukan.

Proses implementasi kebijakan publik melibatkan penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Implementasi mencakup semua tugas yang dilakukan untuk mencapai kebijakan publik, seringkali melalui pembuatan program yang dirancang untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.

1.5.3.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1.5.3.3.1 Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin dalam Alfatih (2010) disebutkan ada tiga cara dominan guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan publik, yaitu:

1. Melihat kepatuhan (*compliance*), dimana keberhasilan suatu implementasi yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (*compliance*), pada bagian birokrasi terdapat birokrasi superior atau dengan kata lain dengan tingkat birokrasi pada umumnya dapat mandat khusus yang diatur di dalam suatu undang-undang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah perilaku birokrasi.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah, bahwa suatu implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya dampak (manfaat) yang dikehendaki, bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang ada.

1.5.3.3.2 Model Edwards III

Edwards III, sebagaimana dikutip dalam karya Agustino (2008), menguraikan empat determinan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik:

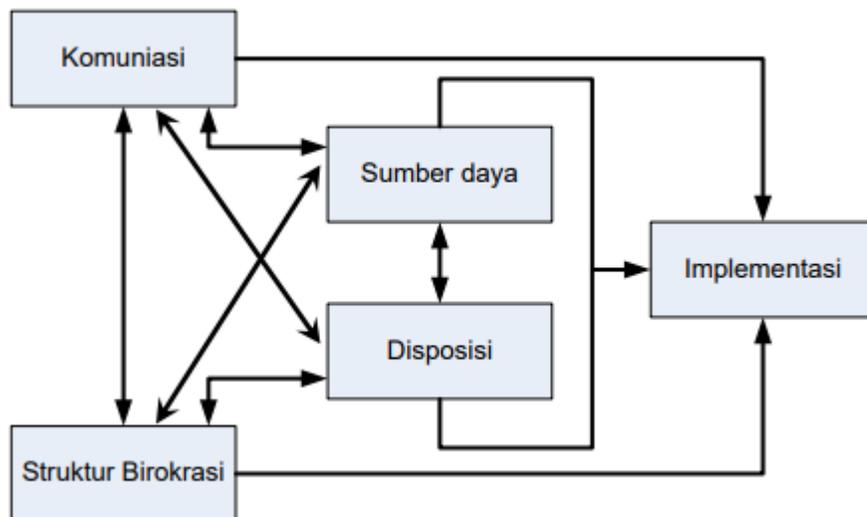
- a. Komunikasi
Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang berhasil, sangat penting bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka. Selain itu, khalayak sasaran harus mendapat informasi yang baik tentang maksud dan tujuan kebijakan untuk mencegah potensi oposisi. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses implementasi.
- b. Faktor sumber daya
Pelaksanaan kebijakan yang optimal bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Untuk lebih spesifik, sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, seperti penerapan staf dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta sumber daya keuangan.
- c. Faktor disposisi
Disposisi yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan sifat-sifat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana, termasuk sifat-sifat seperti kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen. Disposisi pelaksana merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki disposisi yang baik, mereka akan dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif, memenuhi harapan pembuat kebijakan. Hal ini menjadikan disposisi pelaksana sebagai variabel yang signifikan dalam implementasi kebijakan..
- d. Struktur birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi. Perannya dalam mempengaruhi implementasi kebijakan

tidak bisa diremehkan. Untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berhasil dilaksanakan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan bagi mereka yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut..

Menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ini dapat dilakukan dengan cara berikut.

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan George C Edward III



Sumber: Agustino (2008)

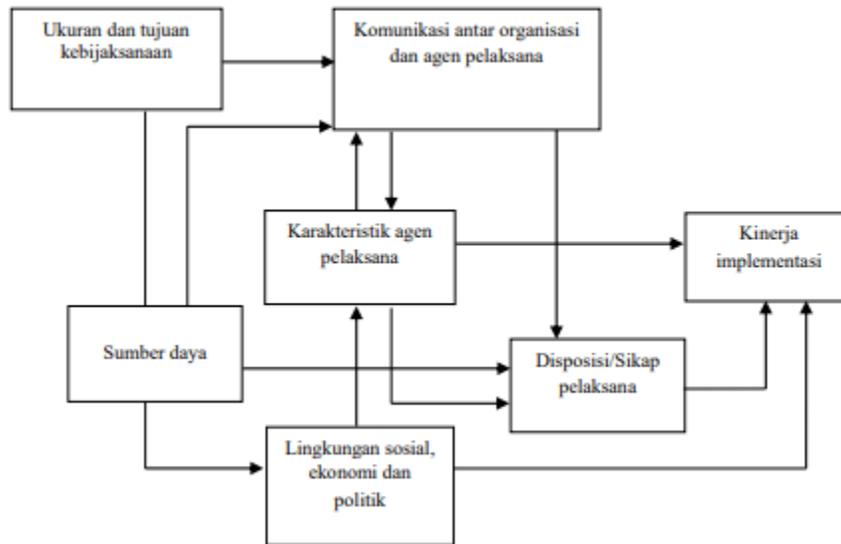
1.5.3.3 Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn, yang dikutip Suharno pada 2010, mengidentifikasi enam variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan.

- a. Agar implementasi kebijakan berhasil, standar dan target kebijakan harus terukur dan jelas. Tujuan kebijakan yang tidak jelas dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemudahan implementasi kebijakan.

- b. Untuk memastikan implementasi kebijakan yang berhasil, sangat penting untuk memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel maupun materi, yang tersedia.
- c. Untuk dapat melaksanakan kebijakan secara efektif, perlu dibangun hubungan antar organisasi yang mendorong kerjasama dan hubungan kerja yang sinergis antar instansi terkait.
- d. Birokrasi dicirikan oleh agen pelaksana yang mengikuti struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan, yang pada akhirnya berdampak pada implementasi kebijakan.
- e. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi sosial, politik dan ekonomi yang meliputi sumber daya lingkungan, tingkat dukungan kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (mendukung atau menentang), opini publik terhadap isu tersebut, dan dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan.
- f. Disposisi pelaksana mencakup tiga komponen penting: 1) reaksi mereka terhadap kebijakan dan bagaimana hal itu memengaruhi kesiapan mereka untuk mengimplementasikannya; 2) pemahaman mereka tentang kebijakan. dan 3) kekuatan disposisi mereka, yang berkaitan dengan nilai dan preferensi pribadi mereka.

Gambar 1.2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn

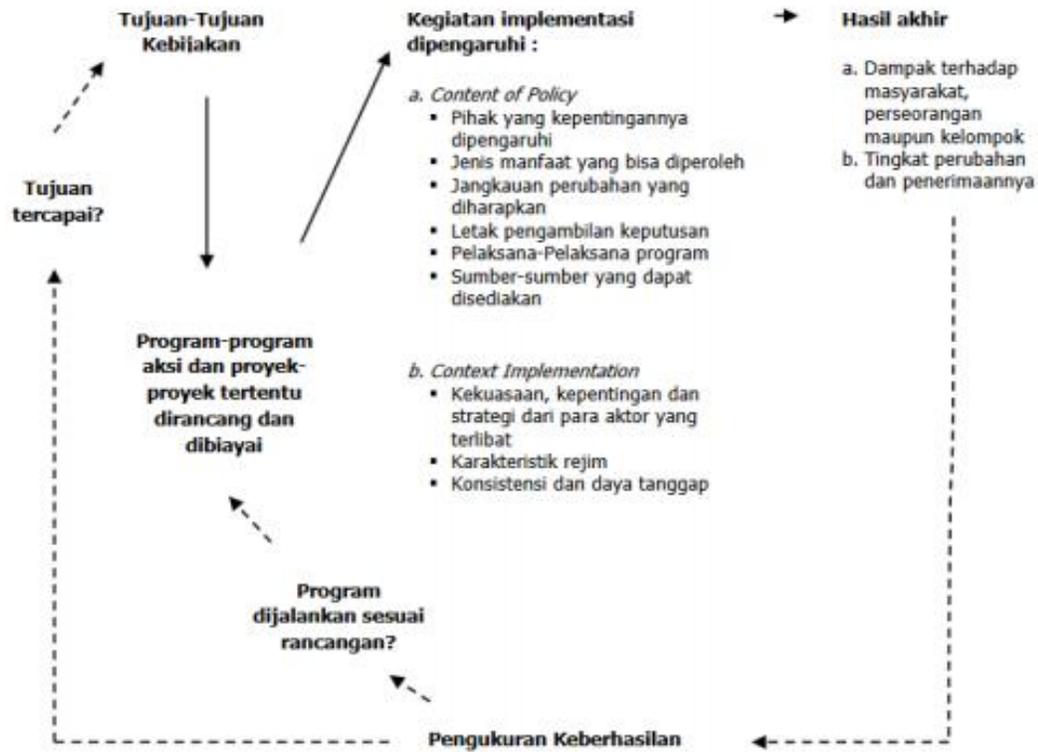
1.5.3.3.4 Model Grindle

Menurut Merilee S. Grindle sebagaimana dirujuk oleh Suharno (2010), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti sejauh mana kepentingan kelompok sasaran digabungkan, jenis manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, besarnya perubahan yang diinginkan, ketepatan kebijakan. lembaga/pelaksana program, kekhususan pelaksana program, dan apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai seperti keuangan atau kompetensi pelaksanaan.

Implementasi kebijakan memiliki tiga variabel lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi rejim yang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.

Gambar 1.3. Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber: Suharno (2010)

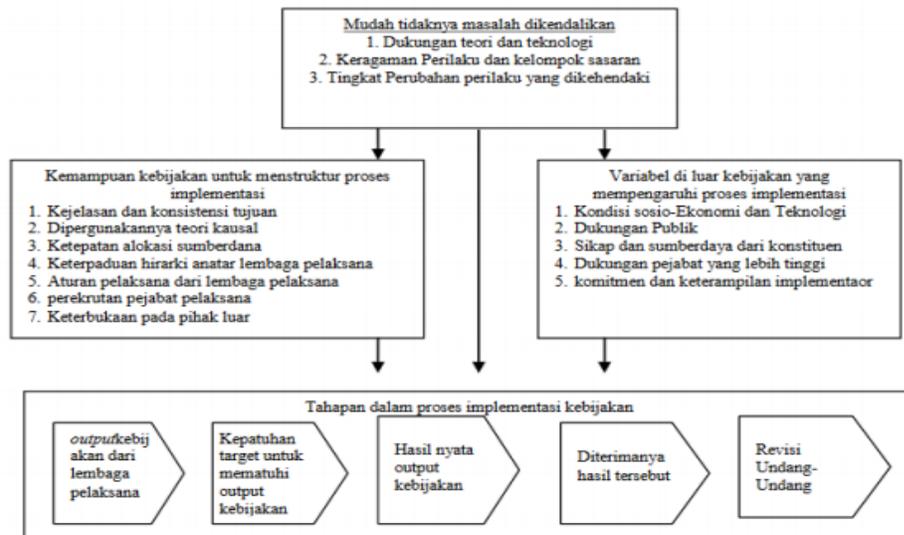
1.5.3.3.5 Model Mazmanian dan Sabatier

Suharno (2010) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Karakteristik masalah terdiri dari faktor-faktor berikut: kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi, tingkat keragaman di antara kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran dalam kaitannya dengan keseluruhan populasi, dan cakupan perilaku yang diharapkan. Mazmanian dan Sabastier menguraikan konsep ini dalam karya mereka.

Karakteristik kebijakan terdiri dari berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: 1) kejelasan dan kelengkapan isinya; 2) sejauh mana

didukung oleh kerangka teoritis; 3) jumlah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaannya; 4) tingkat koneksi dan dukungan antara berbagai institusi yang terlibat dalam pelaksanaannya; 5) kejelasan dan konsistensi pedoman yang ada dalam badan pelaksana; 6) kemauan dan dedikasi staf administrasi terhadap tujuan kebijakan; dan 7) inklusivitas kelompok eksternal dalam implementasi kebijakan. Sedangkan variabel lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: 1) kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat; 2) dukungan dan dukungan publik terhadap suatu kebijakan; 3) sikap kelompok pemilih terhadap suatu kebijakan; dan 4) tingkat kecakapan dan komitmen pejabat dan pelaksana.

Gambar 1.4. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier



Sumber: Suharno (2010)

1.5.3.3.6 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Hamdi

Sesuai Hamdi (2014), pelaksanaan kebijakan merupakan komponen integral dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan, yang melibatkan konversi tujuan menjadi hasil yang nyata. Tujuan tersebut diwakili oleh kebijakan yang spesifik dan terperinci, yang selanjutnya dipecah menjadi program, sub-program, dan kegiatan. Rangkuman ringkas dari indikator implementasi kebijakan dapat dilihat pada Tabel 1.5 seperti terlihat di bawah ini.

Tabel 1.5. Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Variabel	Dimensi	Indikator
	Produktifitas	Jumlah pencapaian kelompok sasaran
Implementasi Kebijakan	Linearitas	Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksanaan)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksanaan, asset, dana dan teknologi)

Sumber: Hamdi (2014).

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, antara lain isi kebijakan, tindakan pihak yang bertugas menjalankan kebijakan, interaksi dalam jaringan, partisipasi penerima yang dituju, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Determinan-determinan tersebut diilustrasikan dalam format skematis pada Tabel 1.6 sebagai determinan implementasi kebijakan publik.

Tabel 1.6. Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Faktor	Indikator
Substansi kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsistensi derivasia isi/spesifikasi kebijakan2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain
Perilaku tugas pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Motivasi kerja2. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang3. Kemampuan pembelajaran
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan2. Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none">1. Kecukupan dana2. Ketersediaan pelaksana3. Kecukupan peralatan4. Ketersediaan informasi5. Ketepatan teknologi

Sumber: Hamdi (2014).

1.5.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Secara teoritis, secara khusus menurut George C. Edward, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keempat faktor tersebut adalah:

- (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) penempatan; dan (4) struktur birokrasi. Namun, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Karang Taruna di Kelurahan Tembalang dalam pendidikan remaja saat ini belum diketahui dan hanya akan dijelaskan setelah dilakukan penelitian. Selain itu, faktor-faktor yang disebutkan Edward di atas belum tentu sama dengan faktor-faktor yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, teori Edward tidak dapat langsung dijadikan pedoman dalam penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan publik khususnya ditinjau dari aspek implementasi, operasional konsep dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.7. Operasional konsep Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskriptor
Implementasi Program Ripley's and Franklin (1986: 232-33)	Tingkat kepatuhan	1. Pembinaan oleh pihak yang berwenang	1. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah berikut metode pelaksanaannya
		2. Pendampingan Karang Taruna	2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan bentuk-bentuknya
		3. Pemberian fasilitas penunjang	3. Fasilitas yang dimaksud berupa material seperti dana, peralatan maupun perlengkapan ataupun non-material seperti bimbingan program, pelatihan, mediasi dan

			koordinasi.
	Kelancaran rutinnitas fungsi	1. Sosialisasi Karang Taruna	1. Sosialisasi program merupakan kegiatan mengenalkan, mengembangkan wawasan dan kesadaran pengurus, warga Karang Taruna dan masyarakat dalam pemberdayaan Karang Taruna
		2. Agenda kegiatan	2. Perencanaan kegiatan Karang Taruna dalam rangka pemberdayaan untuk mencapai program Karang Taruna
		3.	3.
		4. Pelaksanaan program	4. Pelaksanaan program yang bertugas memberdayakan Karang Taruna beserta

			pembagian kerjanya
		5. Pendanaan	5. Metode dan sumber pendanaan dalam pemberdayaan Karang Taruna
		6. Sarana dan prasarana	6. Perlengkapan, kesekretariatan, sarana operasional jejaring kerja, penyelenggaraan kegiatan kesejahtraan sosial dan lainnya, serta metode mendapatkannya
	Kinerja dan dampak yang diinginkan	Kinerja 1. Kegiatan Karang Taruna tersusun secara sistematis	1. Pelaksanaan penyusunan dan pembagian tugas pelaksanaan kegiatan
		2. Kepengurusan Karang Taruna dapat berjalan	2. Struktur pengurus dan keanggotaan jelas dan memiliki pembagian tugas dan kerja serta kaderisasi dan regenerasi anggota

			yang berkesinambungan
		3. Pelaksanaan kegiatan jelas dan terarah	3. Pelaksanaan program dimana program kegiatan mampu berjalan dengan baik, teratir, berkesinambungan dan memiliki prospek yang jelas
		4. Peningkatan ketrampilan dan karakter pemuda	4. Peningkatan ketrampilan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda, peningkatan karakter melalui seminar motivasi, kadarisasi serta penanaman nilai-nilai sosial pada pemuda
		Dampak 5. Kegiatan pemuda yang terarah	5. Pengarahan kegiatan pemuda dengan

			menjadikan Karang Taruna sebagai wadah berkumpul pemuda dalam menyalurkan minat dan bakatnya
--	--	--	--

Sumber: di olah penulis dari data Karang Taruna

1.6.1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku

Kemanjuran implementasi kebijakan dapat diukur dengan memeriksa tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dan mandat yang ditetapkan. Proses implementasi suatu kebijakan juga dievaluasi berdasarkan sejauh mana para pelaksana mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, konsistensi peraturan, serta kesiapan dan keinginan mereka untuk memberlakukan kebijakan tersebut dan kegiatan yang terkait.

Seperti yang telah disebutkan dalam kajian ini, kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan pelaksana terhadap peraturan dan kebijakan, khususnya terkait dengan permasalahan mendasar yang mungkin timbul. Peraturan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomer 23 tahun 2013 yang menjadi dasar hulum pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna termasuk di Kelurahan Tembalang, Kota Semarang. Dalam PERMENSOS Nomer 23 tahun 2013 pasal 28, dijelaskan bahwa pembinaan umum tingkat desa/Kelurahan atau nama lain yang sejenis dijabat oleh kepala desa atau lurah. Pembina umum bertugas melakukan pembinaan umum di desa/Kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/Kelurahan dan memfasilitasi Karang Taruna di desa/Kelurahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tingkat kepatuhan yang dalam dianalisis sesuai dimensi tingkat kepatuhan menurut PERMENSOS Nomer 23 tahun 2013 dan yang terkait dengan upaya pemberdayaan pemuda oleh Karang

Taruna adalah kepatuhan dalam hal pembinaan oleh pihak yang berwenang di tingkat Kelurahan, pendampingan Karang Taruna dan pemberian fasilitas penunjang. Ketiga poin tersebut dipilih penulis sebagai indikator sebab ketiga poin tersebut dilaksanakan maka dapat dikatakan tingkat kepatuhan implementasi program Karang Taruna dalam pemberdayaan remaja berjalan dengan baik.

1.6.2. Lancarnya Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah-Masalah yang Dihadapi

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan mengamati kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi rutin tanpa kendala. Hal ini dapat ditentukan dengan kepatuhan yang konsisten terhadap prosedur yang telah ditetapkan selama tahap implementasi, dan tidak adanya kendala yang dihadapi karena kelancaran fungsi rutin. Keberhasilan penyelesaian pekerjaan rutin akan dipastikan tanpa masalah jika tindakan yang tepat diambil.

Pemberdayaan organisasi kepemudaan menjadi pokok bahasan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013, di jelaskan beberapa bagian peraturan yang menurut peneliti terkait dengan dimensi rutinitas fungsi, beberapa pasal itu antara lain membahas mengenai fungsi-fungsi, yaitu:

- a) Sosialisasi Karang Taruna
- b) Pengelolaan sumber daya
- c) Pendanaan
- d) Sarana dan prasarana
- e) Mekanisme kerja

Dari fungsi-fungsi diatas, apabila dapat dilaksanakan secara rutin dan tanpa adanya hambatan masalah yang mengganggu, maka dapat dikatakan bahwa kelancaran rutinitas fungsi dari implementasi program Karang Taruna berjalan dengan baik.

1.6.3 Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Keberhasilan penerapan kebijakan bergantung pada dua faktor utama: kinerja yang diinginkan dan dampak kebijakan berdasarkan program yang ada. Kebijakan yang berkinerja baik dan mencapai dampak yang diinginkan dianggap berhasil. Perspektif Ripley dan Franklin berpendapat bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini termasuk tingkat kepatuhan, pelaksanaan rutin yang mulus, dan tingkat kinerja dan dampak yang dicapai kebijakan sejalan dengan tujuan program.

Pada penelitian ini, kinerja dan dampak yang diinginkan dari adanya implementasi program Karang Taruna tercantum dengan jelas dalam tujuan dibentuknya Karang Taruna. Tujuan dari dilaksanakannya program Karang Taruna, yaitu:

- a) Kemajuan dan kemajuan setiap anggota masyarakat yang berkualitas dan sadar sosial, yang inovatif, cerdas, dan berbudi pekerti luhur, sangat diperlukan dalam mencegah, mengatasi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi generasi muda.
- b) Penting untuk memastikan pendekatan yang berkelanjutan, komprehensif, dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda yang tinggal di desa, kecamatan, atau daerah serupa;
- a) Tujuan pengembangan usaha adalah untuk meningkatkan kemandirian setiap anggota masyarakat, dengan fokus khusus pada generasi muda.
- b) Pembentukan kemitraan yang menjamin kemajuan terarah dan berkelanjutan dari kemampuan dan potensi generasi muda sangat penting untuk pembangunan.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, peneliti menarik beberapa hal yang dapat menjadi indikator keberhasilan implementasi program Karang Taruna, khususnya dalam dimensi kinerja dan dampak yang diinginkan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

- a) Kegiatan Karang Taruna tersusun secara sistematis
- b) Kepengurusan Karang Taruna dapat berjalan
- c) Program kegiatan jelas dan terarah
- d) Kegiatan pemuda yang terarah

e) Peningkatan ketrampilan dan karakter pemuda

Dari indikator- indikator yang disebutkan oleh peneliti, apabila dapat tercapaian memberikan dampak pada masyarakat sesuai dengan tujuan di laksanakan program tersebut maka dapat dikatakan bahwa dimensi kinerja dan dampak yang di inginkan dari implementasi program dikatakan berjalan dengan baik

1.7. Argumen Penelitian

Dalam ranah penelitian, ada dua jenis argumen dasar: deduksi dan induksi. Argumen ini sangat penting dalam proses penelitian karena digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan cara yang dapat dipahami dan dapat diterima. Deduksi dan induksi dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Deduksi :

Tidak mungkin membuat ulang kalimat tanpa konteks tambahan. "a.deduction" tampaknya berupa penggalan atau judul, bukan kalimat lengkap. Tolong berikan kalimat lengkap untuk saya buat ulang.

Proses kesimpulan pengurangan didasarkan pada alasan yang benar dan sah. Proses dan metode menyimpulkan dengan menguji hipotesis deduksi berdasarkan alasan yang sah disebut hukum duktif, dan peneletian ini disebut studi doactive. Melakukan proses seperti duktif selalu digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

b. Induksi

Induksi adalah metode untuk mencapai kesimpulan berdasarkan satu atau lebih bukti atau fakta. Sebaliknya, pendampingan adalah pendekatan berbeda yang tidak memiliki hubungan definitif antara premis dan kesimpulan. Tindakan mengembangkan hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan disebut sebagai proses induksi, metode ini disebut metode penginduksi, dan penelitian ini disebut penelitian yang diinduksi.

Pada Program karang taruna dalam pembinaan remaja dikelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang peneliti menggunakan bentuk induksi. Hasil Program Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja di Kelurahan Tembalang, Kecamatan

Tembalang, Kota Semarang dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan data ini kita dapat menarik kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa permasalahan nya kurang optimalnya program karang taruna dalam pembinaan remaja dikelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tapi kita dapat membuat kesimpulan lainnya, seperti :

1. Pelaksanaan kegiatan yang belum terjadwal secara sistematis dan rutin,
2. Struktur organisasi dan keanggotaan yang masih baru,
3. Belum maksimalnya pengawasan dari kinerja Karang Taruna.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Fokus kajian ini adalah pelaksanaan Program Karang Taruna dalam pembinaan kepemudaan di Desa Tembalang yang terletak di Kecamatan Tembalang, Semarang dipilihnya Kelurahan tersebut sebagai tempat penelitian karena hanya di Kelurahan tersebut yang Karang Tarunanya aktif pada saat ini. Penelitian ini terutama mengandalkan data yang diperoleh dari pimpinan dan pengurus organisasi kepemudaan. Informan akan diwawancarai secara mendalam sebagai bagian dari metode penelitian deskriptif kualitatif.

1.8.2 Fokus Penelitian

Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Pembinaan Remaja berdasarkan PERMENSOS Nomer 23 tahun 2013 merupakan salah satu program pemerintah berdasarkan kebijakan yang tujuannya meningkatkan pembinaan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kelurahan guna meningkatkan motivasi swadaya masyarakat demi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sendiri, salah satunya melalui program Karang Taruna. Dilihat dari tujuan Karang Taruna yang dapat menjadi wadah bagi para pemuda dan remaja dalam masyarakat Tujuannya adalah untuk menghimpun, mengaktifkan, dan mengalokasikan kontribusi kaum muda terhadap pembangunan, sekaligus memupuk potensi kreatif mereka, sehingga memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam pembangunan di masa depan, maka diharapkan kebijakan ini dapat

mengakomodir kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan Kelurahan khususnya Karang Taruna sendiri agar mampu mencapai tujuan dari adanya Program tersebut.

1.9 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi dalam hal ini organisasi tersebut adalah Karang Taruna Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Semarang. Unit observasinya adalah ketua Karang Taruna, Lurah Tembalang dan Ketua LPMK Tembalang.

1.9.1 Informan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan penelitian. Untuk memilih informan tersebut, peneliti menggunakan metode yang disebut purposive sampling. Teknik ini melibatkan pertimbangan yang disengaja dari faktor-faktor spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai lawan dari proses pemilihan secara acak. Informan yang termasuk dalam penelitian ini adalah: [daftar informan].:

- a. Ketua Karang Taruna Kelurahan Tembalang
- b. Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tembalang
- c. Lurah Kelurahan Tembalang

1.9.2 Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori tergantung pada sifatnya: kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, sumber data juga berperan dalam klasifikasi, dengan data primer dan sekunder menjadi dua pilihan. Data primer dikumpulkan langsung dari subyek atau informan penelitian, dan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari dokumen yang relevan dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh akan dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Indepth Interview/Wawancara mendalam dengan Informan dimana ini Proses pengumpulan informasi untuk memenuhi tujuan penelitian dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal, khususnya percakapan. Untuk tujuan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan seperangkat pedoman wawancara yang memberikan petunjuk umum untuk melakukan wawancara). Wawancara akan dilakukan kepada informan penelitian ini, antara lain: ketua Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tembalang, Lurah Tembalang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan Ketua Forum Kerukunan RT/RW Kelurahan Tembalang guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian ini komprehensif, perlu untuk terlibat dalam dokumentasi yang cermat. Ini termasuk memeriksa dan menganalisis dokumen yang relevan seperti peraturan, laporan, dan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan referensi dari buku, undang-undang, dan peraturan sebagai landasan teori. Data penelitian akan bersumber dari dokumen Karang Taruna Desa Tembalang, serta sumber eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, guna memastikan kelengkapan data yang dikumpulkan.
3. Tindakan mengamati dan mengumpulkan data melalui pengamatan merupakan aspek penting dari penyelidikan ilmiah dan ikut serta langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Kelurahan Tembalang di lapangan.

1.11 Keabsahan Data Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini bersifat kualitatif. Yin (2003) menyarankan empat pedoman khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas dan konsistensi dalam pendekatan kualitatif. Pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*), Konsep validitas konstruk menimbulkan kendala mengenai jaminan bahwa variabel yang diukur memang merupakan variabel yang dimaksud. Untuk mencapai keaslian ini, metode pengumpulan data yang tepat dapat digunakan. Salah satu metode tersebut adalah proses triangulasi, suatu teknik yang memanfaatkan sumber eksternal untuk memeriksa ulang dan memvalidasi data. Ada empat jenis triangulasi, seperti dijelaskan oleh Patton (dalam Sulistiany 1999), yang berfungsi sebagai teknik pemeriksaan untuk memastikan validitas. Jenis ini meliputi:
 - a) Triangulasi data
Berbagai sumber data, termasuk dokumen, arsip, wawancara, dan observasi, dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi, serta mewawancarai individu dengan berbagai perspektif.
 - b) Triangulasi Pengamat
Hasil pengumpulan data ditinjau tidak hanya oleh peneliti, tetapi juga oleh pengamat luar. Untuk studi khusus ini, supervisor studi kasus berperan sebagai pengamat dengan penilaian ahli dan memberikan umpan balik atas hasil pengumpulan data..
 - c) Triangulasi Teori
Bab II penelitian ini menjelaskan penerapan beberapa teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang diperlukan. Teori-teori ini telah dijelaskan dan akan digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan.
 - d) Triangulasi metode
Studi khusus ini melibatkan pemeriksaan subjek tertentu dengan menggunakan berbagai pendekatan, yang mencakup metodologi wawancara dan observasi. Peneliti memilih untuk menggunakan metode

wawancara, dengan dukungan tambahan dari metode observasi selama proses wawancara.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*), merupakan Konsep validitas internal berkaitan dengan sejauh mana kesimpulan penelitian menggambarkan realitas secara akurat. Pencapaian validitas ini bergantung pada interpretasi dan analisis yang tepat. Mengingat bahwa penelitian kualitatif melibatkan berbagai aktivitas, hasilnya dapat berubah. Meskipun tes validitas internal dapat dilakukan, tetap ada potensi kesimpulan alternatif.
3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*), Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada skenario lain. Sementara penelitian kuantitatif tidak memiliki kesimpulan yang pasti, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki validitas eksternal dalam konteks lain, asalkan konteks tersebut serupa.
4. Keajegan (*Reliability*), Gagasan keteguhan, yang berkaitan dengan konsistensi atau ketergantungan hasil penelitian pada replikasi, merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif. Jika penelitian yang sama akan dilakukan dengan subjek yang sama lagi, besar kemungkinan peneliti selanjutnya akan mendapatkan hasil yang sama. Ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya desain penelitian tetapi juga menyoroti pentingnya pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif.

1.12 Teknik Analisis Data

Studi yang dilakukan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan akan dinilai melalui analisis deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur untuk menganalisis data yang terkumpul, seperti yang digariskan oleh Miles dan Huberman, meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sangat penting untuk dicatat dengan cermat dan dengan sangat rinci. Proses reduksi data melibatkan pemadatan informasi dengan berfokus pada elemen kunci, mengidentifikasi tren

dan pola, dan menghilangkan detail asing. Data yang direduksi memberikan gambaran umum yang jelas dan ringkas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan informasi terkait sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik seperti komputer dapat membantu dalam reduksi data dengan memungkinkan peneliti mengkodekan aspek-aspek yang relevan. Selama proses reduksi, peneliti meringkas, mengidentifikasi data penting, dan mengkategorikan informasi menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan sebutan numerik. Data yang tidak penting dapat dibuang untuk merampingkan informasi.

2. Model Data (*Data Display*)

Aspek penting dari manajemen informasi adalah model data, khususnya cara data disajikan kepada pengguna. Tampilan data adalah komponen mendasar dari proses ini, karena menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan data dan bagaimana data diatur untuk memfasilitasi pemahaman.

Setelah data diringkas, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format seperti deskripsi ringkas, representasi grafis, korelasi antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Menurut penelitian Miles dan Huberman (1984), metode yang paling umum untuk menyajikan data kualitatif adalah melalui teks naratif. Ini menyiratkan bahwa teks naratif adalah cara yang disukai untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Selain itu, bentuk tampilan data lainnya termasuk grafik, matriks, dan jaringan

Ketika berhadapan dengan fenomena yang kompleks dan dinamis, diharapkan setiap informasi yang dikumpulkan saat memasuki lapangan akan berkembang seiring waktu. Penelitian harus dilakukan untuk menguji setiap hipotesis awal, meskipun masih dalam tahap hipotesis. Jika hipotesis yang dirumuskan secara konsisten didukung oleh data yang dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat ditetapkan sebagai grounded theory. Grounded theory adalah teori yang ditemukan melalui penalaran induktif, berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus. Ketika pola diidentifikasi dan secara konsisten didukung oleh data yang dikumpulkan selama

penelitian, pola tersebut menjadi pola standar yang tetap tidak berubah. Pola-pola ini kemudian disajikan dalam laporan penelitian akhir

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Proses menarik atau memverifikasi kesimpulan merupakan langkah penting dalam setiap tugas analitis atau berbasis penelitian.

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat dipecah menjadi tiga langkah berbeda. Langkah pertama melibatkan pengembangan kesimpulan awal yang, meskipun bersifat sementara, berfungsi sebagai titik awal untuk pengumpulan data lebih lanjut. Jika tahap pengumpulan data berikutnya gagal menghasilkan bukti kuat untuk mendukung kesimpulan ini, mereka akan berubah. Namun, jika pengumpulan data di masa depan mendukung kesimpulan awal, mereka dapat dianggap kredibel dan dapat dipercaya.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif memiliki potensi untuk mengatasi masalah asli yang diajukan di awal. Namun, karena sifat sementara dari masalah dan perumusannya dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin tidak sepenuhnya menjawab masalah awal. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan. Temuan ini dapat terwujud dalam bentuk deskripsi detail atau klarifikasi dari objek atau konsep yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas.